

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Febrinawati, (2019) *Pembuktian perkara perdata*, Yogyakarta: UII pres.
- Hiariej, Eddy. O.S, (2012) *terori & hukum pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- Harahap, Yahya (2004) *Hukum acara perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Krisna. (1996). *Hukum Acara Perdata teori dan Praktek*. Bandung.
PT Grafitri Budi utami.
- Mertokusumo, Sudikno. (1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia*.
Yogyakarta. Liberty.
- Muhamad, Abdulkadir. (1996). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung.
PT Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, wirjono R. (1982). *Hukum Acara Perdata DiIndonesia*.
Bandung. Sumur Bandung.
- Pitlo. (1978). *Pembuktian dan Daluwarsa*. Cirebon. PT Intermasa.
- Sutantio, retnowulan & Iskandar Oeripkartawinata. (1997). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung. Mandar Maju.
- Subekti, (2008). *hukum pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, (2015). *Hukum pembuktian*, Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Saija, Ronald. (2021). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Deepublish.
- Simanjuntak, P.N.H (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta. Prendamedia Group.
- Yulia. (2015). *Hukum Perdata*. Lhokseumawe. CV. Bina Edukasi.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Kitap Undang-Undang Hukum Perdata

HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*)

RBg (*Reglement Voor de Buitengewesten*)

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Penjabat Pembuat Akta Tanah Perubahan Atas Peraturan Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Penjabat Pembuat Akata Tanah.

Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Dasar Pokok Agraria.

Jurnal

Ayu, Agatha Wilona. (2016). Kekutan Hukum Daya Pembuktian Kepemilikan Atas Tanah Dengan Latter C (*Studi Kasus DiKecamatan Tembalang Kota Semarang*).

Atmajaya, Dewa Gede. (2018). Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum, Denpasar: Universitas Warmadewa.

Charistianawati. (2003). Peranan Kutipan Latter C Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah, surabaya: Unair.

Chabibah, Nur. (2019). Kepastian hukum status perusahaan perkebunan kelapa sawit pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 138/PUU-XIII/2015. (Skripsi Jember, Universitas Jember).

Hotijah, Nur. (2020). Alat Bukti Hak Milik Atas Tanah Yang Tanahnya Belum Bersertifikat. (Skripsi, Universitas Jember, jember,Indonesia).

Ismail, ilyas. (Sonata, Depri Liber. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, 8 (1).

Juanda, H. Enda. (2016). Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia. Vol 4, No (1).

Kusuma, Dadi Arja. (2017). Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Yang Kuat.(Tesis Magister, Kenotariatan universitas Mataram).

Rina, Fitriani Nasution. (2018). Kekuatan Pembuktian Rincik Untuk Hak Kepemilikan Atas Tanah (*Studi Kasus Putusan No.475PK/pdt/2016*).

Wasono, Dono Doto. (2017). Kekuatan Hukum Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Sebagai Bukti Hukum Penguasaan Atas Sebidang Tanah (*studi di Kota Pontianak*).

Website

Fadli, ardiasyah. (2021). *Konflik Agraria Sektor Perkebunan Didominasi Perkebunan Sawit*. Diakses pada 13 April 2022 dari <https://www.kompas.com/properti/read/2021/01/07/070000321/konflik-agraria-sektor-perkebunan-didominasi-perusahaan-sawit>